

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Indonesia merupakan awal perjuangan rakyat untuk mencapai arti kemerdekaan yang haqiqi. Proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal perjuangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia dibagi dalam dua golongan utama yaitu golongan priyai dan golongan masyarakat biasa. Golongan priyai berasal dari golongan bangsawan-bangsawan. Golongan priyai menjadi sangat diuntungkan baik dalam masa penjajahan Jepang maupun Belanda. Kesenjangan sosial yang telah terjadi semakin diperparah dengan kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan yang tidak stabil.¹

Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam menjaga persatuan dan membangun negara. Salah satu tantangan terbesarnya yaitu menjaga kedaulatan negara dan keutuhan negara. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah tidak berjalan baik. Pemerintahan daerah

¹ Irvan Tasnur, Muhammad Rijal Fadli. Republik Indonesia Serikat : Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949). *Candrasangkala*,5.(2019) hlm.58

diberi kekuasaan penuh untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Akibatnya, pemerintah pusat tidak bisa mengontrol kebijakan-kebijakan daerah.²

Memasuki periode Demokrasi Liberal yaitu tahun 1950-1957, Indonesia mencoba untuk menerapkan praktik Demokrasi Bebas dengan cara membiarkan semua ide, gagasan, dan ideologi bersaing dalam kontestasi politik nasional untuk memperebutkan kursi di dalam pemerintahan. Penerapan praktis Demokrasi ini meniru parlemen Belanda ternyata mengalami kegagalan karena tidak cocoknya dengan kultur masyarakat Indonesia. Akibatnya, Demokrasi Liberal berujung pada pembentukan kabinet koalisi yang berisikan orang-orang dengan orientasi politik yang berbeda-beda.³ Hal ini menyebabkan rumitnya pengambilan keputusan untuk meraih konsensus sehingga sulitnya mencapai keselarasan politik dan stabilitas nasional.

Aktivitas politik Dewan Daerah mulai dianggap berbahaya bagi pemerintah pusat karena menimbulkan jarak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga menimbulkan ketegangan politik berskala nasional. Pada tanggal 15 Februari 1958, ketegangan antara pusat dan daerah memuncak dan meledak. Sehingga Dewan Daerah memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi.

² Irvan Tasnur, Muhammad Rijal Fadli. Ibid, hlm.59

³ Kahin dan Aud. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri : Menyikap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiiti, 1997

Dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan tandingan dan menegaskan bahwa mereka terbebas dari kewajiban untuk taat kepada Soekarno selaku kepala negara saat itu.⁴

Terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) didasari oleh ketidakpuasan masyarakat daerah terpelosok khususnya daerah Sumatera terhadap pemerintah pusat dan dana pembangunan. Masyarakat Sumatera dan Sulawesi merasa diabaikan oleh pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini mendorong terbentuknya beberapa dewan, yaitu Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda.⁵ Aksi Dewan Daerah memproklamasikan pembentukan PRRI ini tentu saja mendapat perhatian khusus Dewan Garuda. Sejak awal berdirinya Dewan Garuda, memang sudah terjadi keretakan antara internal tokoh di dalamnya.

B. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul di atas, agar pembahasan mengenai permasalahan pada penelitian ini tidak melebar, maka penulis perlu pembatasan masalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai, terarah, fokus, dan mencapai pemahaman yang diinginkan. Penulis hanya menjelaskan aksi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958-1961 yang meliputi ideologi dan tujuan yang melatarbelakangi terbentuknya. Serta

⁴ Salim, Makmum. *Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*. Jakarta, 1971

⁵ Faishal Hilmy Maulida, Hitam Putih PRRI-PERMESTA : Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961, *Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 176

pemberontakan PRRI ini berfokus pada daerah Sumatera Tengah khususnya Sumatera Barat. Penulis tidak menjelaskan peristiwa-peristiwa sebelum PRRI yang mempengaruhi jalannya pemberontakan dan dampak jangka panjang pasca PRRI.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menumpas gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menumpas gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang terdiri dari dua macam, yaitu secara teoritis dan

akademik. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia terkhusus kepada peristiwa pemberontakan PRRI ini. Serta dapat membuka wawasan dan pengetahuan yang mendalam akan peristiwa-peristiwa yang harus dilalui bangsa Indonesia demi mewujudkan kemerdekaannya.

2. Secara Akademik

a. Dapat menjadi pelengkap data penelitian sebelumnya mengenai pembahasan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pembahasan dan konsep yang berbeda. Sehingga dapat dijadikan sumber rujukan.

b. Dapat memperkaya dan menambah karya penulisan ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon khususnya di Jurusan Sejarah Peradaban Islam.

c. Dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana (S1) Jurusan Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pembentukan PRRI dan PERMESTA memang tidak asing, karena aksi pemberontakan ini terjadi setelah masa PDRI. Menyikapi hal tersebut, melalui tinjauan pustaka ini

dapat memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta terhindar dari adanya duplikat. Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk membedakan penelitian ini,

1. Diki Tri Apriansyah Putra, Farida R. Wargadalem. *Pemberontakan PRRI Sumatera Selatan Tanpa Dewan Garuda*, Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, Vol. 14, No. 2, 2020. Penelitian ini membahas pembentukan dewan-dewan daerah di Sumatera yang didasari oleh wujud kekecewaan masyarakat kepada pemerintah pusat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Dewan Garuda tidak ingin ikut serta dalam pemberontakan PRRI. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, yaitu tentang Dewan Garuda yang mana menjadi cikal bakal pembentukan PRRI. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada pembahasan peran Dewan Garuda yang tidak ikut serta dalam pemberontakan PRRI.

2. Risma Yunia, *Peran Batalyon Infanteri 328 TNI AD dalam Penumpasan Pemberontakan di Indonesia tahun 1958-1969*. Program Studi Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2023. Penelitian ini membahas tentang peran Batalyon Infanteri 328 TNI AD dalam menumpas peristiwa pemberontakan di Indonesia. Batalyon Infanteri 328 TNI AD ikut turut serta dalam menangani

pemberontakan PRRI di Sumatera melalui operasi teritorial setelah melewati berbagai macam penumpasan gabungan TNI. Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu tentang pemberontakan PRRI. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas tentang peran batalyon Infanteri 328 TNI AD dalam penumpasan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan PRRI.

3. Destel Meri, *Aktivitas-Aktivitas Organisasi Kiri di Kabupaten Limapuluh Kota 1958-1965*, Ensiklopedia Jurnal, Vol.1, No.2, Edisi 1, Januari 2019. Penelitian ini membahas aktivitas organisasi-organisasi kiri, khususnya PKI dan BTI, di Kabupaten Limapuluh Kota antara 1958 hingga 1965, dengan fokus pada dampak pemberontakan PRRI. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1958 menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh PKI untuk memperluas pengaruhnya.

Setelah PRRI, PKI melaksanakan program-program seperti reformasi agraria, pembagian alat pertanian, dan pengorganisasian gotong royong untuk mendukung masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini juga mencatat tantangan yang dihadapi oleh organisasi kiri, termasuk kekhawatiran dari tokoh-tokoh Islam dan tindakan represif terhadap mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan politik di Kabupaten Limapuluh Kota selama periode tersebut dan bagaimana pemberontakan PRRI mempengaruhi perkembangan organisasi-organisasi kiri. Persamaan penelitian ini terletak pada

objek penelitiannya yaitu tentang pemberontakan PRRI. Perbedaan penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan setelah adanya aksi pemberontakan yang dilakukan tokoh-tokoh PRRI.

Dengan penelitian berjudul “Pemberontakan PRRI 1958-1961: Tinjauan Historis dan Relevansinya Terhadap Warga Lokal di Sumatera” dipandang sebagai usaha penulis untuk merekonstruksi ulang peristiwa pemberontakan di Sumsel. Penulis sangat tertarik untuk meneliti dan membahas konflik internal rakyat Indonesia paska kemerdekaan. Mengapa dahulu tokoh-tokoh di Sumsel mendirikan Dewan-Dewan daerah dan bagaimana awal mula pemberontakan PRRI bisa terjadi dan bagaimana akhir pemberontakan di Sumsel. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji ulang peristiwa PRRI di Sumsel.

G. Landasan Teori

Berbicara mengenai Pemberontakan PRRI di Sumsel Tahun 1958-1961 terkait topik penulis, maka ada beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu :

1. Pemberontakan

Pemberontakan dalam konteks sosial politik seringkali berkaitan dengan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat berorganisasi dan bergerak untuk menentang kekuasaan yang ada. Pemberontakan sering kali dimulai dengan mobilisasi individu atau kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Organisasi yang efektif sangat penting untuk menyebarkan informasi, mengkoordinasikan

tindakan, dan menggerakkan dukungan. Tilly menekankan bahwa organisasi yang terarah dan terencana lebih efektif dibandingkan dengan gerakan yang bersifat spontan.⁶

Dalam konteks pemberontakan, pemimpin yang memiliki visi dan strategi yang jelas dapat mempengaruhi keberhasilan gerakan. Tilly membandingkan pendekatan Lenin yang lebih terorganisir dengan pendekatan Sorel yang lebih spontan, menunjukkan bahwa strategi yang terencana dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan revolusioner.⁷ Pemberontakan dapat terjadi jika suatu golongan atau kelompok pemimpin tidak adil dalam kebijakannya. Hal ini disebutkan dalam jurnal bagaimana kelompok tani/buruh melakukan pemberontakan kepada pemerintah kolonial karena telah menerapkan sistem tanam paksa dan tidak meratanya ekonomi sosial.⁸

Pemberontakan yang dilakukan PRRI memiliki salah satu tujuan untuk merevolusi kebijakan-kebijakan yang ada. Menurut teori Marxis, revolusi kemungkinan terjadi ketika struktur sosial dan politik serta kepemimpinan yang mengganggu pembangunan ekonomi dan kedaulatan suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat melalui beberapa

⁶ Charles, Tilly. *From Mobilization to Revolution*. In *Collective violence, contentious politics, and social change*. 2017. Hlm 166

⁷ Ibid

⁸ Dwiki Anugrah Gustiawan Putra Hatama, dkk. *Perkembangan Komunisme di Indonesia Tahun 1914-1927*, Jurnal Penelitian Sejarah, Vol.07, No.01, Januari 2022, hlm.63

tahapan yang dimulai dari feodalisme ke kapitalisme ke sosialisme dan akhirnya ke komunisme.⁹

Gerakan PRRI dinilai sebagai gerakan sosial karena memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Pandangan berbeda yang dikemukakan oleh Charles Tilly, Tilly mendefinisikan gerakan sosial merupakan serangkaian aksi perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok atau golongan yang dirugikan sepihak oleh pemegang kekuasaan. Gerakan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dapat dipahami melalui perspektif teori Charles Tilly, yang menyoroti peran struktur sosial, mobilisasi, dan aksi kolektif dalam analisis gerakan sosial dan pemberontakan.¹⁰ Dalam hal ini, PRRI berhasil menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk militer, intelektual, dan masyarakat sipil, yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya secara terencana untuk mencapai tujuan politik mereka.

Selain itu, PRRI menerapkan berbagai bentuk aksi kolektif, seperti demonstrasi, pemberontakan bersenjata, dan propaganda, untuk menyampaikan aspirasi mereka, sejalan dengan konsep "repertoire of contention" yang diusulkan oleh Tilly.¹¹ Munculnya PRRI sebagai reaksi

⁹ James Defronzo, *Revolutions and Revolutionary Movements*, Westview Press, Colorado, 2015, hlm. 20

¹⁰ Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, McGraw-Hill, University of California, 1978, hlm. 213

¹¹ *Ibid*, hlm.151

terhadap ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya di Sumatera, menciptakan kondisi yang mendukung mobilisasi. Gerakan ini juga menunjukkan kesatuan (WUNC) dalam perjuangan mereka, dengan mengklaim legitimasi sebagai wakil dari rakyat yang terpinggirkan. Interaksi dengan struktur kekuasaan yang ada menjadi faktor penting, di mana PRRI berupaya menantang kekuasaan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno, sehingga menciptakan dinamika konflik yang kompleks. Selain itu, dinamika internal dalam gerakan PRRI, yang meliputi perpecahan dan konflik, memengaruhi strategi dan tujuan mereka, mencerminkan kompleksitas yang ada dalam gerakan tersebut.

2. Pemerintahan

Menurut R. Maclver, pemerintah adalah suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, bagaimana orang tersebut dapat diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada.¹² Menurut Samuel E Ward Finer, pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (proses), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode dan system

¹² NG Purba, M. Mun'am, *Upaya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Dewantara, Vol. 1, No. 3, September 2022, hlm. 140

(*manner, method and system*) dari pemerintah pada masyarakat.¹³

Pemerintah merupakan organisasi atau suatu wadah yang mempunyai kekuasaan atau lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Tujuan dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan dengan wajar menurut Rasyid dalam Muhadam Labolo.¹⁴

Terdapat beberapa sistem pemerintahan, yaitu :

a. Sistem pemerintahan presidensial : sistem ini ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, presiden sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab atas legislatif, dan memiliki kekuasaan yang cukup besar.¹⁵

b. Sistem pemerintahan Parlementer : Dalam sistem ini, terdapat hubungan yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah dapat dibubarkan oleh parlemen jika tidak mendapatkan dukungan mayoritas, dan parlemen juga dapat dibubarkan oleh pemerintah melalui kepala negara. Ini mencerminkan prinsip

¹³ Ibid

¹⁴ Ika Fauziana dkk, *Kewenangan Pemerintah dalam mengatasi Konflik Sosial di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.10, No.1, hlm. 69

¹⁵ A.Yani, *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.12, No.2, Juli 2018, hlm.124

defusion of powers, di mana kekuasaan tidak terpisah secara ketat.¹⁶

Teori Maclver menekankan bahwa pemerintahan merupakan hasil dari interaksi sosial yang kompleks. Menurut Maclver, pemerintahan bukan hanya sekedar lembaga formal, melainkan juga merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi kompleks antara individu dan kelompok.¹⁷ Dalam konteks ini, PRRI mewakili kepentingan kelompok yang merasa tidak terwakili dan terabaikan, mencerminkan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dan metode pengumpulan data Studi Literatur atau penelitian kepustakaan. Dengan cara mengumpulkan data berupa jurnal, buku, artikel, catatan guna mendapatkan data yang valid dan terverifikasi. Studi literatur merupakan metode penyelesaian suatu masalah menggunakan penelitian atau sumber-sumber tulisan yang sebelumnya sudah dilakukan. Ada beberapa cara untuk melakukan Studi Literatur yaitu, mengupas (*criticize*),

¹⁶ Ibid, hlm.125

¹⁷ R.M. Maclver, Charles H. Page, Society : An Introductory Analysis, London, U.S.A, 1949

membandingkan (*compare*), meringkas (*summarize*), dan mengumpulkan (*synthesize*) suatu literatur.¹⁸

Studi Kepustakaan menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Di samping itu, studi lapangan menempati peranan setelahnya. Walaupun ada beberapa perbedaan antara riset kepustakaan dengan riset lapangan, akan tetapi keduanya memerlukan penelusuran pustaka. Studi kepustakaan itu berarti kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan metode/teknik tertentu.¹⁹

Penulis juga menggunakan metode historis sebagai metode yang tepat untuk melakukan penelitian sejarah, di antaranya sebagai berikut :

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan awal untuk meneliti penelitian sejarah. Heuristik dapat diartikan sebagai penelusuran jejak sumber-sumber. Teknik pengumpulan sumber ini menjadi hal yang penting dalam penelitian sejarah. Sumber-sumber yang dikumpulkan menjadi landasan dalam sebuah penelitian.²⁰

¹⁸ Arief Nuryana, Parwito, Prahastiwi Utari, *Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Konsep Fenomenologi*, Jurnal ENSAINS, Vol. 2, No. 1, Januari 2019, hlm. 21.

¹⁹ Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Vol. 5, No. 1, Mei 2011, hlm. 38.

²⁰ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah : Metode dan Praktik*, JSI Press, Gresik 2020, hlm.34

Pada penelitian sejarah pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), penulis akan memunculkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah bukti langsung dari peristiwa atau periode tertentu yang berasal dari masa yang sama dengan peristiwa tersebut. Sumber primer ini dapat berisikan dokumen-dokumen, surat, arsip, jurnal, serta artefak fisik seperti barang-barang kuno seperti, bangunan atau karya seni. Sumber primer lainnya dapat berupa wawancara dan catatan lisan, karena mereka dapat memberikan perspektif langsung dari saksi mata atau partisipan.²¹

Sumber sekunder dalam penelitian sejarah menjadi sumber pendukung untuk menguatkan penelitian sejarah. Sumber sekunder juga dapat diartikan sebagai interpretasi atau analisis yang dibuat sejarawan berdasarkan sumber primer. Contoh sumber sekunder yaitu karya-karya ilmiah, jurnal, artikel, serta ulasan, yang memproses, menganalisis, atau menginterpretasi informasi dari sumber primer.²²

Pada penelitian ini, sumber primer yang akan digunakan berasal dari buku dan beberapa arsip yang berasal dari Arsip Nasional Indonesia (ANRI). Buku yang akan dijadikan sumber referensi berjudul “Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA” yang ditulis oleh Makmun Salim dan diterbitkan oleh

²¹ La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa dkk, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, September 2024, hlm.3

²² Ibid

Departemen Pertahanan-Kepolisian Pusat Sejarah ABRI, 1971. Kemudian sumber sekunder atau sumber pendukung yang akan digunakan berasal dari jurnal, artikel, berita, penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Kritik (Verifikasi)

Verifikasi merupakan tahapan setelah mendapatkan sumber-sumber untuk penelitian sejarah. Verifikasi melibatkan pemeriksaan mendalam tentang keabsahan / kevalidan sumber. Bentuk pemilihan sumber ini berbagai macam, namun yang pasti nalar atau logika menjadi dasar pacuan untuk memilah milih sumber-sumber yang telah ditemukan. Pada proses kritik atau verifikasi sejarah meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Pada kritik ekstern, umumnya menyangkut pada keaslian atau keautentikan bahan yang digunakan dalam sumber sejarah. Dapat meliputi tinta apa yang digunakan untuk menulis dokumen guna menemukan usia dokumen tersebut. Pada kritik intern, peneliti dapat menggunakannya untuk menilai atas autentik suatu sumber sejarah. Suatu dokumen bisa dijadikan sumber sejarah apabila terdapat unsur yang relevan. Unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur tersebut paling dekat dengan apa yang terjadi.²³

²³ Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Syekh Nurjati Press, Cirebon 2013, hlm.138

Pada tahap ini, penulis akan mengkroscek ulang terhadap data yang telah didapatkan dan memilah sumber yang valid, agar penulis tidak ragu dalam mengambil keputusan terhadap penelitian yang dilakukan.

3. Interpretasi

Interpretasi berarti membayangkan bagaimana runtutan peristiwa itu terjadi. Imajinasi penulis menjadi hal yang penting dalam tahap ini.²⁴ Tahap interpretasi ini seringkali melibatkan subjektivitas karena melibatkan sudut pandang dan penilaian sejarawan.²⁵ Dari berbagai fakta yang telah didapatkan, kemudian diharuskan untuk disusun agar mempunyai bentuk dan struktur. Hal ini diperlukan guna untuk menghindari suatu penafsiran yang semena-mena akibat pemikiran yang sempit. Menurut Anwar Sanusi dalam bukunya, interpretasi bersifat deskriptif saja belum cukup untuk penafsiran fakta-fakta sejarah. Seorang sejarawan harus melakukan pencarian landasan penafsiran yang digunakan.²⁶

Pada tahap ini, penulis akan mengumpulkan kembali data-data yang sudah terkumpul dan menyusunnya secara sistematis agar penulis tidak kesulitan untuk lanjut ke tahap penulisan sejarah. Sehingga, fakta-fakta yang dikumpulkan

²⁴ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah : Metode dan Praktik*, Op .Cit, hlm.35

²⁵ La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa dkk, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Loc .Cit, hlm.5

²⁶ Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Syekh Nurjati Press, Loc. Cit, hlm.138

penulis mengenai studi historis tentang sejarah pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dapat disusun oleh peneliti menjadi sebuah cerita sejarah yang kronologis, logis, dan tersusun.

4. Historiografi

Tahap historiografi dalam penulisan sejarah merupakan tahap terakhir. Historiografi dapat diartikan sebagai penulisan atas rekonstruksi atau penataan runtutan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah didapat. Tahap historiografi bisa juga diartikan sebagai tahap penulisan yang akan dijadikan sejarah.²⁷

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penulisan cerita sejarah tentang sejarah pembentukan hingga pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Tahun 1958-1961 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah didapat menjadi suatu cerita sejarah yang logis dan kronologis. Kemudian melakukan penyusunan sejarah secara sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah susunan yang dibuat secara berurutan guna memudahkan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

²⁷ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu sejarah : Metode dan Praktik*, Op .Cit, hlm.36

1. Bab 1, pendahuluan dengan sub pokok bahasan ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Poin-poin tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang mencakup seluruh penelitian sebagai dasar bagi pembahasan berikutnya.
2. Bab II, pembahasan tentang sejarah pembentukan PRRI tahun 1958-1961 di Indonesia dengan sub pokok bahasan ; kondisi politik, ekonomi, sosial Indonesia pasca kemerdekaan, dan pembentukan PRRI.
3. Bab III, pembahasan tentang aksi pemberontakan PRRI dengan sub pokok bahasan ; hubungan PRRI dengan luar negeri, dan upaya pemerintah pusat terhadap pemberontakan PRRI.
4. Bab IV, pembahasan tentang akhir pemberontakan PRRI dengan sub pokok bahasan ; akhir pemberontakan PRRI, dan dampak yang dirasakan oleh warga lokal di Sumatera pasca pemberontakan PRRI.
5. Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan penelitian. Serta saran dan kritik penulis terhadap penelitian ini.